

**ANALISIS PELAKSANAAN KEGIATAN SIMPAN PINJAM  
PEREMPUAN DI DESA KECAMATAN JUJUHAN KABUPATEN BUNGO  
DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
(PNPM) MANDIRI PEDESAAN**

**Artikel**

**O l e h:**

**KRISTIAN MENDROFA  
0921202041**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 2012**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai suatu tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Untuk itu peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan karena merekalah objek sekaligus subjek pembangunan, sehingga berkembanglah model pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat otonomi daerah yang meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat (Sumaryadi, 2005:87). Melalui program-program pembangunan partisipatif tersebut diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri.

Pembangunan partisipatif erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan partisipatif memerlukan upaya dan langkah-langkah untuk mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan. Tujuannya adalah meningkatkan harkat dan martabatnya serta mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Hal tersebut merupakan salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat (Sumaryadi, 2005: 111).

Menurut Wrihatnolo dkk (2002), pemberdayaan dapat diartikan sebagai pemberian kekuasaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah yang cepat, oleh karena itu memiliki tiga tahapan yakni: penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Supriatna (2000) mengatakan bahwa pemberdayaan bermakna ganda; *pertama*, pemberdayaan bermakna kedalam (kepada masyarakat) yaitu suatu usaha untuk mentransformasikan kesadaran rakyat dan sekaligus mendekatkan masyarakat kepada akses untuk perbaikan

kehidupan mereka; *kedua*, pemberdayaan bermakna luar sebagai suatu upaya menggerakkan perubahan kebijakan-kebijakan yang akan merugikan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju ke arah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang disebabkan faktor-faktor tertentu. Untuk menggerakkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat madani yang dapat menjalankan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan (Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2010)

Harapan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia muncul seiring peluncuran PNPM Mandiri Pedesaan yang merupakan kegiatan lanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka diharapkan bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Lingkup kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin pedesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat (terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan dan komunitas/kelompok yang terpinggirkan), meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatnya modal sosial masyarakat serta inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna (Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2010).

Usulan yang didanai dalam PNPM Mandiri Pedesaan dapat diklasifikasikan atas 4 jenis kegiatan yang meliputi, pertama; kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek ataupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin

atau rumah tangga miskin, kedua; peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat, ketiga; kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumberdaya lokal, dan keempat; penambahan permodalan Simpan Pinjam Perempuan (Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2010).

Analisis dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan simpan pinjam perempuan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang dilaksanakan di Desa Sirih Sekapur, apakah sudah sesuai dengan petunjuk teknis operasional PNPM Mandiri Pedesaan atau tidak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses pelaksanaan kegiatan simpan pinjam perempuan dalam PNPM Mandiri Pedesaan. Penelitian ini dipandang perlu untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya pelaksanaan kegiatan simpan pinjam perempuan dalam PNPM Mandiri Pedesaan karena selama ini hanya didasarkan atas laporan-laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Selain itu dalam konteks Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) penting dilakukan karena salah satu tujuan pembangunan adalah mensejahterahkan masyarakat dengan melakukan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan agar terciptanya sebuah kondisi yang lebih baik.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Didalam proses pembangunan sering kali muncul berbagai permasalahan yang menyangkut sampai dimana masyarakat yang menerima proses pembangunan mampu melakukan berbagai penyesuaian terhadap program-program pembangunan tersebut. Didalam kenyataannya, sering sekali terdapat perbedaan kemampuan didalam menerima dan mengelola berbagai bantuan yang datang kepada masyarakat, hal ini berhubungan dengan perbedaan didalam kemampuan secara sosial dan ekonomi diantara berbagai golongan masyarakat tersebut. Dengan kesediaan modal penduduk miskin diharapkan akan lebih mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan secara mandiri.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa untuk melancarkan, mengefektifkan dan mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, penduduk miskin diharapkan membentuk kelompok yang dijadikan wadah untuk mengarahkan pelayanan penanggulangan kemiskinan. Kesatuan dan persatuan dalam kelompok bermanfaat untuk menggali permasalahan bersama dan merumuskan langkah penanggulangan masalah tersebut diantara anggota.

PNPM Mandiri Pedesaan menciptakan lembaga pengelola yang cukup banyak, baik di desa maupun di Kecamatan salah satunya adalah Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini merupakan kegiatan penambahan modal untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo terdiri dari beberapa desa yaitu Desa Sirih sekapur, Desa Ujung Tanjung, Desa Pulau Jelmu, Desa Perkembangan, Desa Rantau Panjang dan Desa Rantau Ikil. Semua desa di Kecamatan Jujuhan mendapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM) Mandiri Pedesaan yang dimulai sejak tahun 2007.

Desa Sirih Sekapur merupakan salah satu lokasi yang dianggap cukup berhasil dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan karena memiliki progres yang cukup baik dilihat dari pelaksanaan kegiatan yang sesuai agenda-agenda yang telah direncanakan baik dalam kegiatan pemberdayaan masyarakatnya maupun dalam kegiatan pembangunan fisik lingkungannya.

Di Desa Sirih Sekapur untuk alokasi dana PNPM Mandiri Pedesaan berupa kegiatan SPP mendapat dana sebesar Rp 45.000.000. Dana yang diberikan kepada kelompok kepada masing-masing anggota kelompok dengan jumlah pinjaman yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok. Dana yang dipinjamkan kepada kelompok SPP, apakah itu berkaitan dengan pengembalian dana kepada pihak PNPM Mandiri Pedesaan, pembuatan pembukuan kelompok yang dapat membantu pertanggungjawaban kelompok

kepada anggota kelompok, kelompok kepada pelaku PNPM Mandiri Pedesaan atau kepada masyarakat.

Melihat besarnya alokasi dana pinjaman yang diberikan kepada anggota kelompok SPP yang ada di Desa Sirih Sekapur, dimana kelompok harus mengelola dan memepertanggungjawabkan dana pinjaman tersebut, selain dari itu kegiatan kelompok SPP ini seluruh anggotanya adalah perempuan dalam pelaksanaannya perlu juga diperhatikan, menurut Yunus (2009) perempuan miskin terbukti lebih cepat menyesuaikan diri jauh lebih baik kemandiriannya dalam proses membangun kemandirian ketimbang laki-laki;

Berkaitan dengan uraian diatas maka timbul pertanyaan yaitu bagaimana pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sirih Sekapur apakah sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan atau tidak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Analisis Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan”**.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan dalam PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sirih Sekapur.
2. Menganalisis pelaksanaan kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sirih Sekapur.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk Pemerintah Kabupaten Bungo terutama Pemerintah Desa dalam mengevaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan untuk mencapai tujuan yang lebih efektif.

2. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran pada bidang ilmu pembangunan pedesaan bahan informasi untuk para peneliti dengan topik yang terkait dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.

## **BAB II**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **2.1 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo dari tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan 20 September 2011. Desa Sirih Sekapur adalah salah satu desa yang menerima program pemberdayaan masyarakat yaitu PNPM Mandiri Pedesaan yang pelaksanaannya telah dimulai pada tahun 2007 dan masih berjalan sampai penelitian ini dilaksanakan.

#### **2.2 Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode Studi Kasus. Penelitian Studi Kasus adalah penelitian yang mendalam mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganisir mengenai kasus tersebut. Subyek penelitian dapat saja berupa individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat (Wirarta, 2006).

#### **2.3 Responden Penelitian**

Responden dari penelitian ini yaitu Camat Jujuhan, Kepala Desa Sirih Sekapur, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Dusun/Kampung, yaitu Dusun Tukum I, Tukum II, Tukum III, Induk, Ketua Karang Taruna Desa Sirih Sekapur, dan seluruh anggota Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu sebanyak 25 orang, Fasilitator pendamping Kecamatan Jujuhan 1 orang, Unit Pelaksanaan Teknis (UPK) Kecamatan Jujuhan 3 orang, Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) 2 orang.

#### **2.4 Fokus Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang pertama yaitu mendeskripsikan kegiatan Kelompok SPP di Desa Sirih Sekapur dalam PNPM Mandiri Pedesaan, fokus penelitian yang diamati adalah:

1. Latar belakang pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sirih Sekapur

2. Tujuan pelaksanaan kegiatan kelompok SPP di Desa Sirih Sekapur dalam PNPM Mandiri Pedesaan (Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2010).

Untuk tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk menganalisis pelaksanaan kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Sirih Sekapur dalam PNPM Mandiri Pedesaan, maka variabel yang diteliti adalah :

1. Ketentuan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tahun 2010
  - 1) Aturan pengelolaan simpanan
    - Penentuan bunga pinjaman
  - 2) Aturan pengelolaan pinjaman
    - Persyaratan pinjaman
    - Jumlah pinjaman maksimal
    - Jangka waktu pinjaman
    - Jadwal angsuran
  - 3) Aturan pertemuan kelompok
    - Jadwal rutin pertemuan kelompok
  - 4) Struktur kelompok
  - 5) Kemampuan untuk menjalankan aturan
    - Pembayaran angsuran
    - Kehadiran pertemuan
    - Kemauan untuk menjalankan sanksi
  - 6) Pengumpulan simpanan/pinjaman
    - Pencatatan administrasi kelompok
  - 7) Penyaluran pinjaman
    - Jumlah yang disalurkan
    - Prosedur penyaluran dana
  - 8) Pengembalian pinjaman

(Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2010).

## **2.5 Jenis Data**

Keberadaan data memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Arikunto (2002), mengemukakan: "Sumber data adalah subyek dari

mana data diperoleh”. Sumber data berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, adalah data yang diambil langsung, tanpa perantara dari sumbernya (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian data primer yang penulis gunakan adalah data yang penulis peroleh melalui hasil wawancara, dengan seluruh responden sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kegiatan simpan pinjam perempuan dalam Program PNPM Mandiri Pedesaan.
2. Data Sekunder, adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya, data sekunder biasanya diambil dari dokumen (laporan, karya tulis orang lain, majalah dan koran) atau seseorang mendapat informasi dari “orang lain” (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan penulis adalah data yang diperoleh dari instansi pemerintah di Kabupaten Bungo dan Kecamatan Jujuhan Desa Sirih Sekapur yang telah ada sebelumnya. Data sekunder tersebut berupa data-data mengenai Kecamatan Jujuhan, serta informasi dari dokumen orang lain yang berhubungan dengan penelitian serta mendukung kegiatan penelitian penulis berupa majalah, koran, karya tulis orang lain.

## **2.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data meliputi instrumen, metode dan prosedur yang berkaitan dengan proses pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan data di lapangan, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1) Wawancara**

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka. Dalam wawancara kita tidak hanya bisa menangkap ide atau pemahaman responden.

### **2) Pengumpulan Data Sekunder**

Data sekunder digunakan untuk mendukung analisis dan interpretasi data pada penelitian ini. Data-data sekunder yang digunakan berupa data tertulis atau

gambar yang berisi mengenai data-data kependudukan, data-data rencana kegiatan pemberdayaan dan jenis-jenis kegiatan yang pernah dilakukan, serta arsip-arsip lain yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sirih Sekapur.

## **2.7 Analisa Data**

1. Pada tujuan yang pertama mendeskripsikan kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sirih Sekapur dengan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok, manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas pada peristiwa masa sekarang. Deskripsi pelaksanaan kegiatan kelompok Simpan Pinjam Perempuan dalam PNPM Mandiri Pedesaan diketahui dengan bertanya langsung kepada responden atau menggunakan data-data yang ada pada instansi terkait.
2. Pada tujuan kedua yaitu menganalisis pelaksanaan kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sirih Sekapur metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang dianalisa adalah mekanisme pengelolaan dan ketentuan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Dalam analisis kualitatif, langkah-langkah analisis yang sering digunakan untuk memahami komponen-komponen data adalah melalui (a) reduksi data, (b) penyajian data dan (c) menarik kesimpulan/verifikasi (Milles and Huberman, 2009: 591-592). Reduksi data dimaksudkan untuk menata data agar menjadi lebih ringkas, terstruktur dan sesuai dengan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik reduksi data ini meliputi tahapan perangkuman data (*data summary*), pengkodean (*coding*), merumuskan tema-tema, pengelompokan (*clustering*) dan penyajian cerita secara tertulis.

Penyajian data merupakan bagian kedua dari tahap analisis, yang terdiri dari langkah-langkah penyusunan ringkasan terstruktur dan sinopsis, deskripsi singkat, diagram-diagram, atau matriks dengan teks. Tahap ketiga berupa penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji.

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian**

##### **3.1.1 Letak Geografis**

Desa Sirih Sekapur merupakan salah satu desa dari lima desa yang ada di Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo. Jarak Desa Sirih Sekapur dari Ibu Kota Kabupaten Bungo yaitu 55 Km, sedangkan jarak Desa Sirih Sekapur dari ibu kota Kecamatan yaitu 2 Km. Desa Sirih Sekapur memiliki luas 15.044 Ha yang terdiri dari lima Dusun/kampung yaitu Perkembangan, Tukum I, Tukum II, Tukum III, Dusun/Kampung Induk.

Desa Sirih Sekapur secara topografi pada umumnya bergelombang sampai agak curam dengan ketinggian antara 1325-1360 m dpl, yang memiliki jenis tanah Andosol dan Latosol dengan iklim basah bercurah hujan rata-rata 2650-2700 mm/tahun. Desa Sirih Sekapur berbatasan langsung dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Rumbai (Kab. Dharmasraya)

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rantau Ikil Kec. Jujuhan

Sebelah Barat berbatasan dengan Ujung Tanjung Kec. Jujuhan

Sebelah Timur berbatasan dengan Rantau Panjang Kec. Jujuhan

(Kantor Desa Sirih Sekapur, 2011).

##### **3.1.2 Penduduk**

Desa Sirih Sekapur pada tahun 2010 memiliki penduduk sebanyak 1.570 jiwa dengan 532 kepala keluarga (KK). Dari 1.570 jiwa penduduk Desa Sirih Sekapur tersebut tersebar di lima Dusun/Kampung yaitu Dusun/kampung Tukum I, Tukum II, Tukum III, Dusun/Kampung Induk. Penduduk laki-laki berjumlah 750 orang, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 820 orang.

##### **3.1.3 Mata Pencarian Penduduk**

Sebagian besar penduduk Desa Sirih Sekapur mempunyai mata pencarian sebagai petani yaitu 64.68%, ini berarti penduduk menggantungkan diri terhadap lahan pertanian. Persentase yang paling sedikit adalah mata pencarian Penjahit

yaitu hanya 0,25%. Untuk Karyawan PT yaitu sebanyak 15.52%, jenis mata pencarian lain hanya berkisar dibawah 8%

#### **3.1.4 Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan di Desa Sirih Sekapur masih sangat rendah karena tingkat pendidikan masyarakat Desa Sirih Sekapur sangat banyak yang berpendidikan hanya tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu 34.54%, sedangkan tidak Tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 32.56 %. Penduduk yang menamatkan pendidikan Sarjana hanya 1.33 %.

#### **3.1.5 Sarana**

Sarana yang lengkap sangat dibutuhkan oleh masyarakat dimanapun berada untuk membuka keterisolan suatu wilayah. Dibidang ekonomi sarana yang lengkap juga sangat dibutuhkan agar roda perekonomian masyarakat Desa Sirih Sekapur berjalan dengan lancar dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sarana yang tersedia untuk pelayanan publik di Desa Sirih Sekapur meliputi Sarana Kesehatan, Pendidikan, Tempat Ibadah dan Olahraga. Pada sarana kesehatan terdapat 1 unit Puskesmas, dan 4 unit Posyandu. Dalam operasional sarana kesehatan ini dilakukan oleh Tenaga Medis yang terdiri dari Bidan Desa.

### **3.2 Identitas Responden**

Sebagian besar responden penelitian tergolong usia produktif yaitu sebanyak 8 orang (66.67%) berumur dibawah 40 tahun, dari tingkat pendidikan responden sebagai anggota kelompok masih tergolong sangat baik, responden yang menempuh sampai jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 4 orang (33.33%), dan responden yang menempuh sampai jenjang Sarjana sebanyak 8 orang (66.67%). Menurut jenis kelamin semua responden adalah perempuan 2 orang (16.67%) dan laki-laki 10 orang (83.33%).

### **3.3 Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan dalam PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo**

#### **3.3.1 Latar Belakang Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Program ini dilakukan untuk mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pedesaan. PNPM - MP mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998.

Program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia yang kurang mampu di wilayah pedesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan lokal melalui pendampingan, pelatihan, dan dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM). Dalam PNPM Mandiri Pedesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pemanfaatan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desa. Cara menetapkan kebutuhan prioritas dengan cara meranking usulan-usulan proposal dari masing-masing kelompok oleh Kepala Desa dan Aparat Desa, BPD yang dibantu oleh petugas Fasilitator Kecamatan dan PJOK yang ditugaskan di Kecamatan Jujuhan sampai pada pelaksanaan kegiatan dan keberlanjutannya. Perankingan dilakukan dengan mengurutkan usulan proposal, urutan didasarkan pada kebutuhan dana yg diperlukan.

Di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Sosialisasi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan telah dimulai sejak bulan Mei tahun 2007, dimana kegiatan sosialisasinya dimulai dari Kecamatan Jujuhan yg diawali dengan kegiatan sosialisasi Kecamatan dan dilanjutkan dengan Sosialisasi yang dilaksanakan di Desa Sirih Sekapur. Pada awal kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Mei tahun 2007 Desa Sirih Sekapur untuk usulan yang ditetapkan di Musyawarah Desa

Perencanaan sebagai usulan desa ke MAD Prioritas Usulan PNPM Mandiri Pedesaan adalah kegiatan sarana/prasarana yaitu pembangunan gedung Posyandu 1 unit serta kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebanyak 3 kelompok.

### **3.3.2 Prinsip Pokok Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan Di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sirih Sekapur Menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Bertumpu pada pembangunan manusia. Dalam penerapannya masyarakat di Desa Sirih Sekapur lebih memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.
2. Otonomi. Dalam penerapannya masyarakat di Desa Sirih Sekapur menggunakan hak dan kewenangan untuk mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar.

### **3.3.3 Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan Di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo**

#### **3.3.3.1 Tujuan**

Adapun tujuan dari pelaksanaan Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sirih Sekapur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.

#### **3.3.3.2 Sasaran**

Adapun sasaran dari pelaksanaan Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sirih Sekapur adalah sebagai berikut:

1. Lembaga kepemimpinan masyarakat (BKM) yang aspiratif, representatif, dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat.
2. Tersedianya wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi

serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan. Meningkatnya akses terhadap pelayanan kebutuhan dasar bagi warga miskin dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran MDGs (Hasil Penelitian, 2011).

### **3.4 Analisis Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Dalam PNPM Mandiri Pedesaan Di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo**

#### **3.4.1 Gambaran Umum Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang Dilaksanakan Di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo**

Di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan terdapat 3 (tiga) Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang didanai oleh PNPM Mandiri Pedesaan yaitu Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu; Mawar, Anggrek dan Nurul Iman<sup>1</sup>. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mawar berada di Dusun Induk Desa, Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Anggrek berada di Dusun Tukum I, sedangkan Kelompok Simpan Perempuan (SPP) berada di Dusun Tukum III.

#### **3.4.2 Ketentuan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan Tahun 2010 di Desa Sirih Sekapur Kecamatan jujuhan Kabupaten Bungo**

##### **3.4.2.1 Penentuan Bunga Simpanan dan Bunga Pinjaman**

Berdasarkan hasil wawancara dengan FK (Fasilitator Kecamatan) Jujuhan penentuan tingkat bunga pinjaman ditetapkan melalui forum musyawarah. Musyawarah dilakukan di Kecamatan Jujuhan, dengan mengundang seluruh kelompok SPP yang ada di Kecamatan Jujuhan, dalam musyawarah ini dihadiri oleh kelompok SPP dari Desa Rantau Ikil, Ujung Tanjung, Pulau Jelm, Desa Perkembang, dan Sirih Sekapur, untuk Desa Sirih Sekapur dihadiri oleh Ibu-ibu SPP yaitu kelompok Mawar, Anggrek dan Nurul Iman I (Lampiran 2). Sebelum menetapkan tingkat pinjaman bunga terlebih dahulu pihak-pihak terkait yaitu Ketua TPK beserta anggota, UPK, dan Fasilitator, melakukan survey ke Bank-bank yang ada di Kecamatan jujuhan untuk mengetahui tingkat bunga terendah Bank yang ada di Kecamatan Jujuhan. Hasil pengamatan ini digunakan untuk

penetapan tingkat bunga yang akan diberlakukan pada kelompok SPP untuk disepakati oleh semua anggota kelompok.

### **3.4.3 Aturan Pengelolaan Pinjaman**

#### **3.4.3.1 Persyaratan Pinjaman**

Sebelum Anggota kelompok mendapatkan dana dari PNPM Mandiri Pedesaan, semua kelompok pemanfaat harus memenuhi persyaratan-persyaratan baik itu yang ada dikelompok ataupun yang ada di pihak PNPM Mandiri Pedesaan. Penetapan persyaratan pinjaman ini tertuang dalam Perjanjian Pinjaman, yaitu sebagai berikut:

- ❖ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- ❖ Mengisi Perjanjian Tanggung renteng (Surat pernyataan jika ada anggota kelompok yang tidak membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman, maka secara kelompok dan bersama-sama akan melunasinya)
- ❖ Anggota membayar tepat waktu
- ❖ Anggota membayar menghadiri pertemuan kelompok
- ❖ Setiap anggota wajib membayar uang sosial

#### **3.4.3.2 Jumlah Pinjaman Maksimal**

PNPM Mandiri Pedesaan sebagai sumber dana dasarnya sangat terbuka kepada semua pemanfaat dana, setiap anggota kelompok akan diberikan dana pinjaman oleh PNPM Mandiri Pedesaan melalui UPK setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPK, kelompok mendapatkan dana sesuai dengan usulan. Dana yang didapatkan oleh kelompok batasan minimumnya Rp 5.000.000 dan maksimum Rp 30.000.000. Kelompok menentukan jumlah dana yang mereka butuhkan dengan cara membuat rencana kegiatan yang tergantung pada rencana kegiatan anggota kelompok.

#### **3.4.3.3 Jangka Waktu Pinjaman**

Penetapan jangka waktu pinjaman oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaan kepada kelompok ditetapkan di dalam perjanjian pinjaman, untuk Kelompok (SPP) Mawar, Angrek dan Nurul Iman I berjangka waktu 12 bulan yang

terhitung mulai dana dicairkan yaitu tanggal 14 Juli 2010 dan berakhir pada 17 Juli 2011.

Untuk menjalankan jangka waktu pinjaman oleh kelompok semua struktur yang ada pada kelompok harus berfungsi dengan baik, sehingga dalam jangka waktu pinjaman tidak ada yang terkendala, seperti pembayaran yang macet dan lain-lain. Penentuan jangka waktu pinjaman ini kelompok hanya mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaan dalam pedoman Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan jangka waktu pinjaman sumber dana BLM maksimal 12 bulan.

#### **3.4.3.4 Jadwal Angsuran**

Berdasarkan hasil penelitian dalam penentuan jadwal angsuran masing-masing kelompok yaitu Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mawar, Angrek dan Nurul Iman I, menetapkan jadwal angsuran anggota pada kelompok pada tanggal 15 setiap bulannya, dan untuk pembayaran angsuran pinjaman masing-masing kelompok ke UPK adalah tanggal 17 setiap bulannya.

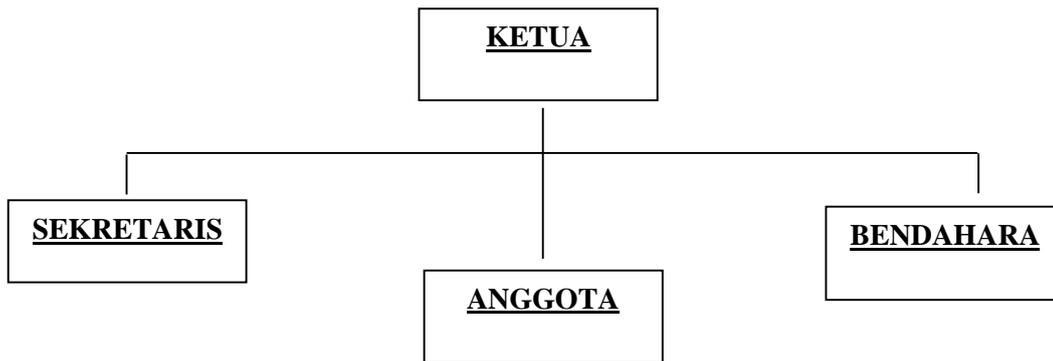
#### **3.4.3.5 Aturan Pertemuan Kelompok**

Dalam persyaratan kelompok pertemuan rutin kelompok merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh semua anggota kelompok. Jadwal rutin pertemuan masing-masing kelompok ini ditetapkan dengan alasan tetap terjadinya pertemuan dengan pengurus, selain itu pengurus dan anggota dapat memikirkan bagaimana supaya kelompok dapat terus maju dan berkembang lebih baik lagi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPK apabila kelompok sudah jarang dalam melakukan pertemuan rutin, maka kelompok tersebut cepat atau lambat akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kelompok, seperti kelompok yang tidak memiliki arah atau rasa tanggung jawab anggota kelompok akan semakin berkurang dan keadaan ini bisa membuat kelompok mengalami kemacetan didalam melakukan angsuran pinjaman.

#### **3.4.3.6 Struktur Kelompok**

Kelompok – kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang ada di Desa Sirih Sekapur dalam menjalankan kegiatan kelompoknya agar berjalan dengan aturan kelompok yang telah ditetapkan, setiap kelompok harus memiliki

struktur kelompok, masing-masing kelompok terdapat pengurus kelompok yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua kelompok, 1 (satu) orang sekretaris, dan 1 (satu) orang bendahara kelompok, jangka waktu kepengurusannya yaitu 1 (satu) tahun. Struktur kelompok masing-masing kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sama, untuk lebih jelasnya struktur masing-masing kelompok dapat dilihat pada gambar berikut ini :



*Gambar. Struktur Kelompok SPP di Desa Sirih Sekapur*

Pelaksanaan kegiatan dalam masing-masing kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP), ketua bertugas memimpin rapat, memberikan informasi kepada anggota, mewakili kelompok dalam pengurusan proposal pengajuan pinjaman dana ke pihak PNPM Mandiri Pedesaan, dan bertanggung jawab atas semua anggota kelompok. Sekretaris kelompok bertugas mencatat keputusan musyawarah kelompok dan bersama ketua mewakili kelompok untuk mengurus kepentingan kelompok, sedangkan bendahara kelompok bertugas untuk mencatat membukukan uang iuran kelompok, pengurusan uang pinjaman dan mengurus keuangan kelompok.

#### **3.4.3.7 Pembayaran Angsuran**

Pembayaran angsuran merupakan salah satu dari kewajiban anggota yang harus dipenuhi, pembayaran angsuran ini sesuai dengan keputusannya masing-masing kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) baik, kelompok Mawar, Anggrek, dan Nurul Iman I dibayarkan setiap tanggal 15. Pembayaran angsuran setiap anggota akan berbeda-beda tergantung jumlah pinjamannya.

#### **3.4.3.8 Kehadiran Pertemuan**

Kehadiran pertemuan juga merupakan salah satu kewajiban dari setiap anggota masing-masing kelompok, adapun tujuan pertemuan ini adalah untuk

meningkatkan ikatan silaturahmi antara anggota kelompok. Dari hasil wawancara dengan masing-masing pengurus kelompok kehadiran anggota kelompok dalam pertemuan tidak begitu menjadi perhatian didalam kelompok ini, bahwasanya bagi anggota kelompok diharapkan hadir dalam pertemuan kelompok, dan bagi anggota kelompok yang tidak dapat hadir tidak masalah asalkan memberitahukan kepada pengurus terlebih dahulu. Sanksi untuk pertemuan kelompok tidak ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan Kehadiran Pertemuan telah sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

#### **3.4.3.9 Kemaian untuk Menjalankan Sanksi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus kelompok bahwa kelompok tidak menekankan peraturan kepada semua anggota, karena pengurus lebih menekankan kepada setiap anggota kelompok agar menjalankan aturan-aturan yang ada dikelompok dengan rasa solidaritas dan tanggung jawab serta mengharapkan kepada setiap anggota kelompok tidak terpengaruh dengan isu-isu yang ada diluar kelompok yang akan merusak kelestarian dari kelompok.

#### **3.4.4 Pengumpulan Simpanan/pinjaman**

##### **3.4.4.2 Pencatatan Administrasi Kelompok**

Administrasi dan dokumen yang dikelola oleh pengurus kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu kelompok Mawar, Anggrek dan Nurul Iman I. Administrasi kelompok tersebut berupa nama, umur, pekerjaan dan alamat anggota kelompok SPP adalah berupa buku kas Kelompok, kartu kredit, buku notulen rapat, daftar hadir kelompok, seperti Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SPPB).

#### **3.4.5 Penyaluran Simpanan/Pinjaman**

##### **3.4.5.2 Jumlah Dana yang Disalurkan**

Jumlah dana yang disalurkan dimasing-masing kelompok adalah dana yang diajukan oleh masing-masing kelompok kepada PNPM Mandiri Pedesaan, setelah pengajuan dana oleh kelompok kepada pihak PNPM Mandiri Pedesaan akan melakukan verifikasi ke kelompok selanjutnya apabila kelompok lulus verifikasi maka kelompok akan mendapatkan dana pinjaman yang telah mereka ajukan. Untuk Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mawar jumlah dana yang disalurkan oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaan kepada kelompok ini adalah

sebanyak Rp 8.000.000, sedangkan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Anggrek sebanyak Rp 7.000.000 dan Nurul Iman I sebanyak Rp 30.000.000.

#### **3.4.5.3 Prosedur Penyaluran Dana**

Penyaluran dana merupakan proses penyaluran dari rekening kolektif BLM yang dikelola UPK kepada TPK di desa, berdasarkan wawancara dengan pihak UPK penyaluran dana terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1. Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran kwitansi.
2. Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok.
3. Dalam saat yang bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP dikurangi Operasional UPK 2 % dari total seluruh pinjaman Rp 45.000.000 yaitu sebesar Rp 949.000 dan dana Operasional TPK desa 3% dari total pinjaman Rp. 45.000.000 yaitu sebesar Rp 1.422.000 (Lampiran 5) dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh ketua masing-masing kelompok sebagai penerima dan UPK sebagai pengelola kegiatan. Tujuan kwitansi ini adalah kelompok telah menerima langsung dari UPK dan selanjutnya mengembalikan kepada UPK.
4. Kelompok membuat perjanjian pinjaman dengan UPK sebagai lampiran kwitansi penerima dana.
5. Kelompok menyerahkan kwitansi/tanda terima uang setiap kelompok UPK.

#### **3.4.5.4 Pengembalian Pinjaman**

Kegiatan penting dalam kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah lancarnya pengembalian pinjaman anggota kepada kelompok dan kelompok kepada pihak PNPM Mandiri Pedesaan. Prosedur dalam pengembalian pinjaman terlebih dahulu anggota kelompok sesuai dengan waktu penyetoran pengembalian yang sudah ditetapkan oleh kelompok. Setelah dana terkumpul di kelompok, pengurus kelompok menyerahkan kepada Ketua TPK Bapak Aan Susanto selanjutnya Ketua menyerahkan kepada UPK Bapak Subur Rahayu yang ada di Kecamatan Jujuhan.

Kalau dilihat prinsip kerja antara Grameen Bank dengan Prinsip Kerja kegiatan perguliran dana PNPM Mandiri Pedesaan, maka prinsip kerja perguliran

PNPM Mandiri Pedesaan sudah menggunakan prinsip yang dimiliki oleh Grameen Bank.

## **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Desa Sirih Sekapur sudah dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan tahun 2010.
2. Pelaksanaan kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan pada Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sirih Sekapur sudah berdasarkan ketentuan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tahun 2010 dalam mengelola dana PNPM Mandiri ini terbukti dengan tingkat pengembalian pinjaman kepada pihak PNPM Mandiri Pedesaan tidak mengalami tunggakan dan keterlambatan dalam pembayaran kepada pihak PNPM Mandiri Pedesaan.

### **4.2 Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Desa Sirih Sekapur sudah dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis Operasional, untuk itu kepada semua pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muara Bungo diharapkan untuk kegiatan selanjutnya agar selalu mempertahankan pelaksanaan kegiatan ini dengan baik dan melakukannya sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).
2. Untuk mencapai keberlanjutan kegiatan kelompok diharapkan adanya kemauan kelompok untuk lebih mempedulikan prinsip-prinsip keorganisasian, mempunyai anggaran dasar rumah tangga, sangsi

sehingga kelompok dapat berkembang dan lebih maju serta berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alshop dan Heinshon. 2008, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Depdiknas, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI, *Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu*, Direktur Bina Gizi Masyarakat Depkes dan Kesos, Jakarta, 2001.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indoensia, 2010. *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, Jakarta.
- Fetterman, David and Wandersman, Abraham, 2007, *Empowerment Evaluation: Yesterday, Today, and Tomorrow*, *American Journal of Evaluation* 2007; 28; 179.
- Foy, Nancy, 1994, *Empowering People at Work*, London:Grower Publishing Company.
- Fujikake, Yoko, 2008, *Qualitative Evaluation: Evaluating People's Empowerent*, *Japanese Journal of Evaluation Studies*, Vol 8 No 2, 2008, pp 25 – 37, Japan Evaluation Society.
- Gujit, Irene, 2000, *Methodological Issues in Participation Monitoring and Evaluation, Learning From Change Issues and Experiences i Participatory Monitoring and Evaluation*, Canada: ITDG Publishing.
- Gulo, W, 2002. *Metodologi Penelitian*, Grafindo, Jakarta.
- Khairuddin, H. 2010. *Efektivitas PNPM Pedesaan Dalam Rangka Otonomi Menuju Desa Mandiri Kasus Studi: Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*. Thesis. Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang.
- Mardikanto. 1998. *Pembangunan Pedesaan di Indonesia, Liberty dan P3PK UGM*, Yogyakarta.
- Midgley, James. 1986. *Community Participation, Social Development and The State*. London. Methuen.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia, Jakarta.